



Judul : Novanto Pantas Diganti
Tanggal : Jumat, 24 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Novanto Pantas Diganti

• ALI MANSUR, SANTI SOPIA

MKD diyakini bakal independen dalam memproses perkara Novanto.

JAKARTA — Berbagai kalangan dari unsur masyarakat hingga partai politik menilai Ketua DPR Setya Novanto pantas diganti. Sebab, Novanto telah melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan kode etik DPR RI.

Pada Kamis (23/11), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia melaporkan ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu atas dugaan pelanggaran UU MD3 dan kode etik DPR. "Kami minta agar MKD segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya," ujar Ketua HMPI Andi Fajar Asti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Menurut HMPI, penetapan sebagaimana tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian diikuti penahanan, sudah membuat Novanto pantas diganti. Sebab, perbuatannya telah menjatuhkan wibawa, martabat, serta nama baik DPR.

Bahkan, lanjut Andi, hal itu berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara tersebut. "Lagi pula masih banyak anggota lainnya yang baik dan mampu memimpin DPR RI. Jangan hanya karena seorang Novanto, rusak semuanya," katanya.

Dia pun mengatakan, HMPI per-

caya MKD merupakan alat kelengkapan dewan yang independen bakal memproses laporan tanpa harus menunggu praperadilan. HMPI akan mengawal MKD hingga Novanto diberhentikan. "Kami masih percaya MKD bisa bersikap tegas terhadap kasus ini," ujar Andi.

Seruan agar Novanto diganti dari posisinya juga disampaikan sejumlah partai politik. Meskipun demikian, mereka menyerahkan mekanismenya kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Juru bicara Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengakui Demokrat punya harapan agar Novanto secara ikhlas mengundurkan diri. Hal ini mengingat Novanto tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya karena ditahan KPK. "Tetapi Demokrat tidak ingin terlalu jauh mencampuri hak eksklusif Partai Golkar," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/11). Ferdinand juga menyebutkan Demokrat menyerahkan kepada MKD yang akan memproses dugaan pelanggaran etik.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memproses dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh Novanto. Sebab, Novanto secara etik dinilai tidak layak menjadi ketua DPR dan perlu diganti.

Apalagi, menurut Komarudin, kader Partai Golkar di DPR juga masih banyak yang lebih baik dan pantas menggantikan Novanto. Dengan pergantian juga, kata dia, dapat menjaga wibawa dan kehormatan

lembaga DPR. "Karena ini kan menyentut kita ini apa pun alasannya wakil rakyat. Jadi ini soal kepastian," katanya.

Sebelumnya Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, proses penyidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto berjalan. MKD tidak terpengaruh dengan surat yang bersangkutan serta keputusan rapat pleno Partai Golkar.

Ia juga mengatakan, MKD pada Selasa (21/11) telah mengadakan rapat internal dalam rangka memverifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi. Namun, rapat batal karena ada beberapa pimpinan fraksi tidak bisa hadir.

Kendati begitu, Sufmi memastikan MKD tidak tinggal diam menanggapi permasalahan yang menjerat Novanto. "Apapun itu, MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI," katanya.

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, MKD segera melakukan rapat untuk menentukan posisi ketua DPR RI yang baru. "Kami tidak tinggal diam, kami mencoba untuk konsultasi ke fraksi-fraksi. Mudah-mudahan dalam pekan depan itu bisa dilakukan," ujar Sudding, di Jakarta, Kamis (23/11).

Menurut dia, meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Novanto tetap bisa diberhentikan dengan beberapa catatan. Di antaranya, jika Novanto telah melanggar sumpah dan janji jabatan. Novanto tidak dapat menjalankan tugasnya secara

berkelanjutan ataukah berhalangan tetap selama tiga bulan. Kemudian ketika Novanto dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas.

Maka dengan demikian, kata Sudding, catatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi pekan depan. Sehingga, MKD dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Fraksi Golkar untuk melakukan pergantian. "Jadi hasilnya dapat diketahui pascarapat konsultasi dengan seluruh fraksi tersebut," ujarnya.

Diperiksa KPK

Kemarin, KPK memeriksa Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Selepas diperiksa, dia menegaskan masih menjadi pucuk pimpinan tertinggi DPR. "Masih," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11).

Novanto bahkan mengklaim, kondisi DPR tetap baik-baik saja. Sedangkan terkait pemeriksaan hari ini, dia menyebut hanya lanjutan dari pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan KPK. Utamanya terkait posisinya sebagai ketua Fraksi Partai Golkar pada saat proyek direncanakan.

Kuasa hukum Novanto, Otto Hasibuan, mengatakan, kasus kliennya dalam perkara dugaan korupsi proyek KTP-el yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu masih gelap. Dia pun meminta masyarakat tidak menjifikasi Novanto bersalah. "Itu kita akan tahu kalau sudah dirumuskan dalam dakwaan jaksa. Jadi sampai sekarang belum tahu," kata Otto. ■ fauziah murid/umar muchtar ed: muhammad iqbal *

Indepth

Istri Novanto
Dicegah ke
Luar Negeri

Hlm- 9